

# Analisa dan Proyeksi Perkembangan Industri Perbankan Indonesia

J. PANGLAYKIM

## PENGANTAR

Apabila kita mau melihat perkembangan industri perbankan sekarang, kita tidak bisa melupakan anjuran Bank Indonesia kepada bank-bank swasta tahun 1980 untuk mengadakan merger. Kebijakan Bank Indonesia ini merupakan langkah rasionalisasi.

Perbankan sejak tahun 1950-an selalu dikaitkan dengan partai politik atau tokoh politik, sebab pada waktu itu partai politik dan tokoh politik merupakan penentu kebijaksanaan dalam bidang ekonomi dan moneter. Dapat dikatakan, bahwa hampir tidak ada satu partai politik atau tokoh politik yang tidak mempunyai aliansi dengan salah satu bank. Syarat yang ditentukan oleh instansi teknis saat itu juga amat mudah untuk dipenuhi, sehingga jumlah bank yang memperoleh izin kerja mendekati 125 buah.

Selama masa itu pertumbuhan industri perbankan sangat seret, karena masyarakat bisnis saat itu dihadapkan pada pasar yang dikenal sebagai "pasar penjual" (sellers' market). Mereka juga tidak memerlukan jasa perbankan karena para pembeli memberikan *voorfinanciering* tanpa tambahan bunga.

Situasi perbankan seperti itu menyebabkan Bank Indonesia mengadakan langkah rasionalisasi dengan menganjurkan bank-bank merger. Dengan kebijaksanaan ini bank-bank yang tergolong sehat dan agak sehat meningkat jumlahnya. Pada tahun-tahun 1971-1980, jumlah bank swasta sekitar 125 buah berkurang menjadi hanya 70 buah. Kebijakan ini juga telah merangsang perkembangan sektor perbankan dan berhasil menciptakan suatu suasana yang memungkinkan sektor swasta tampil dengan citra yang lebih bersih, lepas dari kaitan-kaitan tokoh politik.

Berinjak dari keadaan sesudah rasionalisasi ini kita akan melihat perkembangan industri perbankan selama tahun 1983, di mana pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan 1 Juni 1983. Dan berdasarkan keadaan serta perkembangan tahun 1983, akan diutarakan arah yang sebaiknya diambil dalam perkembangan perbankan nasional pada tahun 1984 dan sesudahnya, yaitu menjadikan perbankan nasional sebagai industri pertumbuhan (growth industry) dalam Pelita IV.

### PERKEMBANGAN SELAMA TAHUN 1983

Dalam mencoba menganalisa perkembangan industri perbankan selama tahun 1983, kita akan melihat asset dan modal cadangan, serta kredit yang disalurkan setiap bank. Dari angka-angka ini kita akan bisa mengetahui bagaimana posisi jenis-jenis bank di Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat dampak Kebijakan 1 Juni 1983, yang merupakan tindakan pemerintah sebagai langkah ke arah proses pematangan perbankan nasional. Kita juga akan melihat, bagaimana dampak Kebijakan 1 Juni tersebut pada perkembangan deposito dan perkembangan pemberian kredit.

#### Posisi Berbagai Jenis Perbankan

Di sini kami akan mengemukakan beberapa data yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi berbagai jenis perbankan dalam masyarakat bisnis nasional. Posisi ini bisa dilihat dari besarnya asset dan modal cadangan serta besarnya kredit yang disalurkan.

Pada Tabel 1 kita dapat melihat komposisi asset dan modal cadangan jenis-jenis perbankan.

Dilihat dari sudut asset, modal cadangan, dan keuntungan bank-bank negara menempati posisi dominan, lebih-lebih bila di dalamnya termasuk Bank Indonesia. Perbandingan asset bank-bank negara dan bank-bank swasta nasional sekitar 6,66 berbanding 1, sedangkan keuntungan bank-bank negara 3,74 kali keuntungan bank-bank swasta nasional. Ini memperlihatkan bahwa tingkat produktivitas bank-bank swasta lebih tinggi daripada bank-bank pemerintah, atau dapat juga menggambarkan bahwa bank-bank negara masih harus memikul tanggung jawab sosial sebagai penggerak perkembangan (agent of development). Tetapi dengan tambahan tanggung jawab itu bank-bank pemerintah masih dapat memperlihatkan keuntungan yang tergolong meyakinkan.

Tabel 1

ASSET, MODAL CADANGAN DAN KEUNTUNGAN BANK  
(s/d 30 Juni 1983, dalam milyar rupiah)

	Asset	Modal Cadangan	Keuntungan
1. Bank-bank negara termasuk Bapindo dan BTN (7)	16.632	1.103	147,0
2. Bank-bank asing termasuk Bank Per-dania (11)	1.611	68,4	34,1
3. Bank swasta nasional (73)	2.499	234,2	39,3

Sumber: *Berita Perbanas*, Edisi 8/1983, Oktober 1983.

Demikian juga dalam pemberian kredit posisi bank pemerintah masih menonjol. Untuk menelaah, peranan masing-masing jenis perbankan itu dalam pemberian kredit, kami mengambil data-data dari *Laporan Mingguan Bank Indonesia*<sup>1</sup> sebagai berikut:

Tabel 2

## JUMLAH KREDIT MENURUT JENIS BANK

Jenis Bank	Jumlah Kredit	%
1. Bank Indonesia	Rp 2.375 milyar	16,24
2. Bank-bank Umum Pemerintah	Rp 9.593 milyar	65,61
3. Bank-bank Pembangunan Daerah	Rp 390 milyar	2,66
4. Bank-bank Swasta Nasional	Rp 1.543 milyar	10,55
5. Bank-bank Asing	Rp 719 milyar	4,91
	Rp 14.620 milyar	100,00

Pemberian kredit oleh bank-bank pemerintah, Bank Indonesia dan bank-bank pembangunan daerah secara total adalah sebesar 84,53% dari seluruh pemberian kredit, sehingga dengan demikian dapat dikatakan kedudukan sektor pemerintah cukup dominan dibandingkan dengan bank-bank swasta nasional. Bank-bank swasta nasional dan bank-bank asing masing-masing

<sup>1</sup>*Laporan Mingguan Bank Indonesia*, No. 1280, 17 Nopember 1983. Angka-angka tersebut sampai dengan minggu pertama bulan Oktober 1983.

hanya menyalurkan 10,55% dan 4,91% dari seluruh kredit. Bila kegiatan-kegiatan perwakilan bank-bank pemerintah di 'lepas pantai' (off-shore) diperhitungkan maka saham pemberian kredit oleh bank-bank pemerintah akan jauh lebih besar.

Sesuai dengan posisi bank pemerintah yang dominan, maka pola pemberian kredit juga menggambarkan peningkatan sektor pemerintah, perusahaan-perusahaan negara dan proyek yang dibiayai pemerintah.

Dari jumlah kredit sampai dengan minggu pertama bulan Oktober 1983 yang besarnya Rp 14.620 milyar, maka komposisi jumlah kredit yang diberikan oleh bank-bank pemerintah dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3

#### PEMBERIAN KREDIT MENURUT KEGIATAN EKONOMI

	Jumlah	%
1. Sektor pertanian	Rp 1.397 milyar	9,56
2. Sektor pertambangan	Rp 1.017 milyar	6,96
3. Sektor perindustrian	Rp 5.640 milyar <sup>a</sup>	38,58
4. Sektor perdagangan	Rp 4.635 milyar <sup>b</sup>	31,70
5. Sektor jasa-jasa	Rp 1.268 milyar	8,67
6. Sektor lainnya	Rp 663 milyar	4,53
<b>Total</b>	<b>Rp 14.620 milyar</b>	<b>100,00</b>

<sup>a</sup>Termasuk pinjaman Pertamina kepada pemerintah dalam rangka pembayaran hutang luar negerinya.

<sup>b</sup>Termasuk pengadaan pangan dan perhotelan.

#### Perkembangan Deposito

Kebijaksanaan 1 Juni 1983 yang antara lain menghapus pagu (ceiling) pemberian kredit kepada semua bank, memperkenankan bank-bank negara menentukan tingkat bunga deposito berjangka sendiri (bagi bank-bank swasta nasional sudah lama tidak berlaku ketentuan tingkat bunga deposito berjangka) telah menimbulkan perkembangan seperti terlihat pada Tabel 4 berikut ini.

Pada Tabel 4, kita dapat melihat telah terjadi kenaikan jumlah deposito sebesar Rp 669,9 milyar atau 73% yakni dari Rp 911,8 milyar pada bulan Januari 1983 menjadi Rp 1.581,7 milyar pada minggu keempat bulan

Tabel 4

DEPOSITO BERJANGKA BANK-BANK PEMERINTAH  
(Ringkasan)

Pada akhir	24 bulan	18 bulan	12 bulan	9 bulan	6 bulan	3 bulan dan	Jumlah
						kurang dari 3 bulan	
Mei	835,6	-	41,2	-	26,9	3,1	911,3
Juni	763,2	-	111,9	-	119,3	129,6	1.124,0
Juli	726,4	-	217,9	-	143,8	200,0	1.287,1
Agustus	684,1	0,2	352,7	0,1	200,3	262,7	1.500,1
September-III	661,1	0,6	408,9	0,1	213,5	290,5	1.574,7
September-IV	655,3	0,7	417,0	0,1	210,4	297,7	1.581,7

Sumber: Laporan Mingguan Bank Indonesia, No. 1280, 17 Nopember 1983, hal. 20, 23, 24, 25, 26 dan 27.

September 1983. Bila kita melihat deposito itu dari sudut jangka waktunya maka terlihat bahwa deposito berjangka waktu 24 bulan mengalami penurunan, sedangkan deposito yang berjangka waktu 12 bulan meningkat. Peningkatan jumlah deposito yang paling menyolok ialah deposito berjangka waktu 3 bulan, dari Rp 8,1 milyar pada bulan Mei 1983 menjadi Rp 297,7 milyar pada bulan September 1983.

Pada mulanya kita memperkirakan bahwa penurunan jumlah deposito berjangka waktu 24 bulan itu terjadi karena beberapa golongan nasabah yang merasa khawatir menaruh uangnya untuk jangka waktu panjang untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan diberlakukannya kebijaksanaan moneter baru lainnya. Tetapi ternyata mereka memindahkan depositonya dari yang berjangka waktu 24 bulan ke yang berjangka waktu lebih pendek, 12 atau 6 bulan. Sedangkan peningkatan jumlah deposito berjangka waktu 3 bulan disebabkan oleh adanya dana-dana yang belum/tidak terpakai sementara kegiatan bisnis sedang lesu. Pendapatan dari bunga yang berkisar antara 16% sampai 18% setahun dari deposito dapat dikatakan sebagai penghasilan yang lumayan dalam suasana bisnis yang sedang sepi.

Menurut pengamatan, mereka yang mendepositokan dananya untuk jangka waktu 3 dan 6 bulan adalah mereka yang tergoiong pengusaha sedangkan yang menaruh dananya untuk jangka waktu yang lebih lama (12 dan 24 bulan) umumnya terdiri dari orang-orang non-bisnis seperti para profesional, pegawai negeri. Dengan mendepositokan dananya dengan jangka waktu lebih pendek, para pengusaha itu akan mempunyai pilihan (option) bila mereka secara mendadak memerlukan dana dalam suasana bisnis yang membaik. Di tahun-tahun mendatang, diperkirakan banyak pengusaha-pengusaha

tingkat menengah dan kecil yang akan memerlukan dana-dana tambahan dari luar sektor perbankan. Para pengusaha tingkat menengah dan kecil akan melakukan hal ini karena mereka lebih mudah mendapatkan dana tersebut dari luar sektor perbankan (pemberian kredit diperhitungkan berdasarkan hubungan pribadi) dan untuk menghindari "kejaran" pajak. Bila mereka ingin mendapat pinjaman dari bank mereka harus memberikan nomor wajib pajak mereka padahal sebagian besar dari mereka belum memiliki nomor wajib pajak tersebut. Beberapa waktu yang lalu, kebutuhan mereka itu disalurkan oleh bank-bank kepada bank-bank pasar, tetapi pada suatu saat bank-bank pasar pun akan meminta nomor wajib pajak kepada nasabahnya itu. Bila demikian, maka dapat diperkirakan bahwa pasar di luar sektor perbankan akan ramai.

Tabel 5 memperlihatkan perkembangan deposito berjangka pada bank-bank devisa dan non-devisa swasta serta bank-bank pemerintah. Ternyata deposito berjangka pada dua jenis bank yang disebut pertama ini pun meningkat meskipun tercatat perbedaan yang cukup menyolok. Jumlah deposito berjangka pada bank-bank devisa swasta pada bulan September 1983 adalah sebesar Rp 531,3 milyar dan pada bank swasta non-devisa sebesar Rp 213 milyar. Dan bila kita membandingkan dengan jumlah deposito berjangka pada bank-bank asing, ternyata deposito bank-bank swasta non-devisa masih lebih sedikit. Bank-bank asing dapat mengumpulkan deposito dari nasabahnya sebesar Rp 507 milyar sampai bulan September 1983, walaupun umumnya bunga deposito yang mereka tawarkan di bawah bunga deposito bank-bank swasta yang tergolong baik devisa maupun non-devisa. Hal ini

Tabel 5

DEPOSITO BERJANGKA BANK-BANK DI INDONESIA (Ringkasan)  
(dalam milyar rupiah)

Tahun	Bank-bank Umum Devi- sa Nasional	Bank Negara	Bank Devisa Swasta	Bank Swasta Non-devisa	Bank-bank Umum Devi- sa Asing	Bank Pemba- ngunan	Peserta Kliring
Mei							
Bulan							
Mei	1.546	(911.8)	(634.2)	146	520	56	2.268
Juni	1.788	(1.124.0)	(664.0)	168	486	59	2.501
Juli	1.946	(1.287.1)	(658.9)	181	503	59	2.689
Agustus	2.029	(1.500.0)	(528.9)	193	501	60	2.783
September	2.113	(1.581.7)	(531.3)	213	507	60	2.893
Oktober	2.456	(n.a.)	(n.a.)	219	550	62	3.287

mungkin menyangkut aspek kepercayaan atau perasaan. Masyarakat tampak cenderung 'menitipkan' uangnya pada bank-bank negara, disusul pada bank-bank swasta devisa, kemudian bank-bank asing, baru bank-bank swasta non-devisa, dan terakhir bank-bank pembangunan (di antara jenis-jenis perbankan itu, bank-bank swasta non-devisa menawarkan bunga deposito yang tertinggi).

### Perkembangan Pemberian Kredit

Pemberian kredit, setelah pagunya dihapus, tampak tidak meningkat menyolok. Peningkatan paling besar terjadi antara akhir Desember 1982 dan Maret 1983 yakni sebesar 5,2%, tetapi setelah bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 1983, kenaikannya hanya di antara 0,1% sampai 2,4% (Lihat Tabel 6).

Tabel 6

#### PERKEMBANGAN PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN NASIONAL (dalam milyar rupiah)

	1982		1983				
	Des.	Maret	Juni	Juli	Agustus	Sept IV	Okt I
1. Bank Indonesia (pinjaman langsung) (2)	2.771	2.388	2.293	2.307	2.287	2.362	2.375
2. Bank-bank Umum Pemerintah (4)	8.031	8.854	9.062	9.195	9.374	9.549	9.593
3. Bank-bank Swasta Nasional (5)	1.197	1.354	1.403	1.391	1.483	1.532	1.543
4. Bank Pembangunan Daerah	357	372	381	382	387	389	390
5. Bank-bank Asing	666	737	661	694	728	776	719
Jumlah	13.022	13.705	13.800	13.969	14.259	14.608	14.620
Kenaikan		5,2%	0,7%	1,2%	2,1%	2,4%	0,1%

Sumber: Laporan Mingguan Bank Indonesia, No. 1280, 17 Nopember 1983.

Bekas Gubernur Bank Sentral, Drs. Rahmat Saleh, dalam pidato tahunannya di hadapan para bankir menyatakan bahwa pagu pemberian kredit tidak akan mengalami banyak peningkatan. Waktu itu bank-bank menjerit meminta agar pagu tersebut dilonggarkan. Setelah pagu dihapus oleh Kebijakan

1 Juni 1983, ternyata permintaan kredit tidak memperlihatkan gejolak yang berlebihan. Sebabnya mungkin tingkat bunga pinjaman mulai melonjak sebagai akibat naiknya 'cost of money' bank-bank termasuk bank-bank pemerintah/negara. Bank-bank pemerintah yang sebelumnya membebaskan bunga hanya sebesar 12% setahun, kini terpaksa harus menaikkan bunga pinjaman itu. Sebab lain mungkin bisnis itu sendiri sedang/masih lesu dan para pengusaha memperlihatkan kecenderungan menyimpan uang idlenya dalam bentuk deposito berjangka pendek yakni antara 3-6 bulan. Bila demikian dapat dikatakan bahwa Kebijakan 1 Juni 1983 telah berhasil menekan tingkat kredit pada batas yang wajar, atau mungkin para bankir telah mencapai suatu tingkat kedewasaan yakni lebih berhati-hati dalam pemberian kredit. Dewasa ini, bank-bank memiliki likuiditas yang cukup tinggi seperti tercermin pada tingkat bunga antar bank (inter-bank rate) yang terlihat menurun yakni menjadi sekitar 14%, padahal pada bulan-bulan April-Juni 1983 yang lalu pernah mencapai 24%.

## KE ARAH PERTUMBUHAN INDUSTRI PERBANKAN?

Setelah kita melihat industri perbankan dari berbagai sudut, berikut ini kami akan mengemukakan pandangan pribadi mengenai kemungkinan-kemungkinan pertumbuhan sektor industri perbankan pada tahun-tahun mendatang. Tetapi ini bukanlah pandangan seorang ahli nujum, melainkan perkiraan yang didasarkan pada beberapa pertimbangan yang diharapkan akan mendorong industri perbankan ke arah penciptaan sarana pengembangan yang lebih pesat. Menurut pandangan kami penciptaan sarana tersebut akan lebih nyata bila sektor-sektor perekonomian dan bisnis lainnya di tingkat nasional dan internasional juga mengalami perubahan. Dengan demikian industri perbankan nasional akan lebih cepat mengarah ke penciptaan sarana-sarana tersebut untuk menjadikannya sebagai industri pertumbuhan (growth industry) yang kuat.

### Kebijakan 1 Juni 1983

Para pengamat industri perbankan dan para aktor bisnis lainnya sering melihat masa lampau sebagai masa konsolidasi dan masa penciptaan suasana agar kepercayaan terhadap industri perbankan pulih. Tidaklah mengherankan bila dalam proses konsolidasi kebijakan-kebijaksanaan perbankan yang menjadi pembimbing (guidance) sering justru dilihat sebagai penghambat (constraint). Ini mungkin disebabkan dinamika perkembangan industri per-

bankan terlalu cepat bila dibandingkan dengan kebijaksanaannya. Memang harus diakui bahwa kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang akan selalu dilihat 'terlambat' dibandingkan dengan kenyataan yang sedang berlangsung dalam arena bisnis. Dengan persepsi tersebut, industri perbankan menyambut Kebijakan 1 Juni 1983 sebagai suatu langkah penyegaran pandangan pemerintah (dalam hal ini Bank Indonesia) terhadap industri perbankan nasional. Pemerintah (Bank Indonesia) tampak telah melihat bahwa perbankan nasional sedang mengarah ke suatu tingkat kematangan.

Langkah pertama kebijaksanaan dari Kebijakan 1 Juni 1983 itu ialah pemberian ruang gerak yang lebih luas seperti pemberian izin pembukaan cabang, pembebasan penentuan tingkat bunga, penghilangan tingkat pagu pemberian kredit. Mungkin ini dapat dipandang sebagai langkah-langkah pertama mengarahkan industri perbankan ke industri pertumbuhan. Namun dalam menelaah perkembangan industri perbankan, kita hendaknya tidak terlalu terpaku pada kebijaksanaan pemerintah semata-mata, tetapi mungkin akan berguna bila kita mempertimbangkan kekuatan-kekuatan yang terdapat pada arena bisnis lain. Selain itu kita harus melihat kekuatan-kekuatan yang mungkin akan timbul dalam proses pendorongan industri perbankan ke tingkat yang lebih canggih.

Beberapa waktu yang lalu sektor swasta pernah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk membentuk semacam PT Danareksa yang dikelola oleh pihak swasta (bankir dan tokoh bisnis lainnya). Terhadap permintaan itu, pemerintah belum memberikan jawaban positif (tidak ditolak tetapi juga tidak diizinkan). Mungkin ini disebabkan oleh belum adanya ketentuan dari pihak penguasa di bidang moneter. Dalam kaitan dengan Kebijakan 1 Juni 1983 ini dan penggalakan sektor perbankan menjadi industri pertumbuhan, perlu dipikirkan kembali kemungkinan pembentukan PT seperti itu untuk mempererat kerjasama dua sektor bisnis yakni sektor pemerintah dan sektor swasta. Atau mungkin perlu juga dipertimbangkan, apakah kita bisa memanfaatkan PT semacam itu yang sudah ada, yaitu PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia (SBPI).

Seperti kita ketahui, bank-bank pemerintah/negara memiliki wadah kerjasama berbentuk forum, misalnya bank-bank swasta dalam bentuk Perbanas, para bankirnya memiliki Banker's Club. Kerjasama antara bank-bank pemerintah/negara dan bank-bank swasta (devisa dan non-devisa) terwujud dalam bentuk forum pemegangan saham ASEAN Finance Corporation (AFC) yang dinamakan PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia. Bank-bank pemerintah/negara dan bank-bank swasta masing-masing memiliki saham sebesar 50%.

## Strategi Ekspor dan Perbankan

Negara-negara sedang berkembang termasuk ASEAN dan Indonesia khususnya, dewasa ini sedang giat mencari alternatif untuk meningkatkan ekspor dan penghasilan devisa negara. Indonesia sendiri telah menentukan strateginya yakni strategi ekspor non-migas sebagai salah satu alternatif penting di samping ekspor minyak dan LNG. Bila kita teliti lebih lanjut maka sebenarnya potensi terbesar untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh Repelita IV ialah peningkatan ekspor hasil-hasil industri dan manufaktur dan bahan-bahan mentah industri. Dari pengalaman negara-negara lain kita menarik kesimpulan bahwa hasil-hasil industri dan manufaktur dapat diharapkan sebagai alternatif selain hasil-hasil lain seperti udang, kayu lapis, dan kelapa sawit.

Bila strategi telah ditentukan yakni strategi ekspor dan semua kekuatan telah dihimpun dan diarahkan ke pelaksanaan strategi itu maka kita dapat mengharapkan munculnya berbagai skenario.

Industri manufaktur yang telah ada harus mengalami perombakan dan reorientasi ke ekspor. Dewasa ini, seperti kita lihat, hampir semua perusahaan patungan (joint venture) dengan partner Jepang misalnya, pada dasarnya telah diarahkan ke pengambilan manfaat pasar dan konsumen dalam negeri. Mereka harus melakukan perombakan walaupun harus diakui pekerjaan ini tidaklah mudah.

Selain industri-industri yang sudah ada, diperkirakan ratusan industri baru yang berorientasi ke ekspor akan bermunculan baik dalam bentuk perusahaan patungan atau perusahaan dalam negeri (PMDN). Setiap unit produksi itu harus mampu menciptakan produk-produk yang dapat bersaing di pasar internasional dalam hal harga, kualitas, dan cara memasarkannya. Untuk ini beberapa faktor perlu mendapat perhatian dan di antaranya:

### *Asortimen Produk-produk Manufaktur*

Bila pendirian ratusan perusahaan manufaktur itu telah menjadi kenyataan maka produk-produk dari karet, petrokimia, aluminium misalnya, akan memperkaya perbendaharaan produk-produk manufaktur kita. Dan karena produk-produk itu berorientasi ke ekspor maka diperkirakan dan seharusnya harga dan kualitasnya dapat bersaing di pasar internasional dan dapat memenuhi 'tuntutan' konsumen. Asortimen produk-produk manufaktur itu akan mendorong lembaga-lembaga lain mengadakan perubahan karena pemasaran produk-produk tadi akan sangat berbeda dari pengeksportan/pemasaran hasil-hasil pertanian dalam bentuk bahan mentah.

Konsumennya pun bukan lagi konsumen institusional (pabrik, misalnya) tetapi jutaan konsumen terakhir yang tersebar di seluruh pelosok dunia. Cara penyampaian produk-produk itu pun harus melalui apa yang kita kenal sebagai konsep general trading firm.

Bila kita menelaah pasar di sekitar kita, maka kita melihat bahwa negara-negara berkembang akan terus berusaha memasukkan produk-produk industrinya ke pasar negara-negara industri termasuk Jepang. Persaingan akan sangat tajam! Lalu apakah yang harus kita lakukan, menjual langsung? Apakah lembaga-lembaga perdagangan kita memang sudah mempunyai kemampuan menembus langsung pasar negara-negara industri? Atau haruskah kita bekerjasama dengan partner luar negeri dan/atau menggunakan para general trading firm (Sogo Shosha, misalnya) yang telah memiliki jaringan internasional? Bila kita menggunakan general trading firm/Sogo Shosha, apakah kita akan kembali 'terkotak' dan akan bergantung kepada lembaga-lembaga perdagangan itu? Atau mungkin kita dapat membentuk kerjasama dengan mereka untuk sementara? Jawabannya memerlukan pengkajian yang mendalam. Kelompok usaha yang telah memiliki jaringan internasional, seperti Liem Soei Liong Group dengan Hagemeyer sebagai international trading firm-nya mungkin dapat dilihat sebagai usaha konkrit ke arah persiapan diri melaksanakan strategi ekspor.

#### *Asortimen Produk Harus Disertai Oleh Asortimen Jasa*

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Pada tahap pertama perkembangan assortimen produk-produk ratusan perusahaan manufaktur akan mengambil bentuk perusahaan dengan modal dalam negeri (PMDN) atau perusahaan nasional yang telah mengadakan reorientasi (adjustment). Dalam kaitan ini, perbankan akan didekati oleh para pemrakarsa industri tersebut. Tetapi persoalannya, apakah sektor perbankan nasional sudah dapat memberikan jasa-jasa kepada mereka? Apakah sektor perbankan dapat bertindak sebagai pelopor sementara pengambilan ekuiti karena dewasa ini belum diperkenankan? Apakah dalam perkembangan tersebut hal ini akan mengalami perubahan? Perubahan tersebut merupakan aspek penting untuk meluluskan strategi ekspor meskipun, harus diakui, memang sulit diterapkan. Bila pengambilan ekuiti itu tetap tidak diperkenankan, maka mungkin sebagian kegiatan bisnis akan beralih ke sektor perbankan asing. Tetapi seandainya diperkenankan apakah bank-bank dengan pola dana yang lebih banyak bersifat jangka pendek itu, dapat melakukan pembiayaan ekuiti (equity finance) yang bersifat jangka panjang? Apakah mereka akan dapat menarik modal langsung dari masyarakat berbentuk pengeluaran surat hutang (bond) atau obligasi? Mungkin bank-bank pemerintah/negara dan bank-bank swasta devisa akan lebih berhasil menarik

dana masyarakat itu daripada bank-bank swasta non-devisa. Semua ini masih harus diteliti lebih mendalam.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan strategi ekspor tersebut pada tahun-tahun mendatang masyarakat bisnis kita juga akan membutuhkan jasa-jasa yang lebih bervariasi dari sektor perbankan nasional. Bank-bank tidak hanya sekedar dilihat sebagai pemberi kredit, tetapi mereka pun menghendaki agar kredit itu ditingkatkan kualitasnya dan bervariasi seperti bentuk floating rate note (FRN), pinjaman sindikasi (syndicated loan), surat berharga (commercial paper), promisory notes (promnote).

Jasa-jasa perbankan lain seperti informasi pasar, nasihat dalam penentuan pembiayaan ekspor atau pabrik, akan sangat diperlukan sehingga para petugas bank pun, pada gilirannya, harus memperlihatkan perkembangan yang lebih canggih. Manajer-manajer profesional mungkin sudah harus ditambah dengan para profesional yang mengerti masalah energi, pemasaran dan sebagainya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa karena kebutuhan masyarakat bisnis akan bervariasi maka bank-bank pun harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar dapat memenuhi permintaan nasabahnya. Kegiatan-kegiatan tradisional seperti pemberian kredit akan tetap ada disertai dengan kegiatan-kegiatan pemberian jasa lainnya, karena bila bank-bank swasta nasional tidak berhasil menyediakan jasa-jasa tersebut maka niscaya peranan mereka akan diambil alih oleh bank-bank asing. Dengan demikian, sektor perbankan sudah harus menyiapkan jaringan usaha, informasi, dan kantor di tingkat internasional. Bank-bank negara seperti BNI 1946 dan Bank Eksim, telah melebarkan sayapnya dengan menciptakan jaringan cabang-cabang di Amerika Serikat, misalnya (diresmikan pada tanggal 5 Desember 1983). Usaha pelebaran ini patut dipergiat. Bank-bank swasta nasional, khususnya bank-bank devisa, sampai saat ini belum diperkenankan melebarkan jaringannya ke pasar internasional. Mungkin sebaiknya dipikirkan secara lebih mendalam mengenai kemungkinan-kemungkinan diperkenankannya bank-bank swasta devisa melebarkan jaringan ke tingkat internasional.

Oleh karena itu pada tahun-tahun mendatang, kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai: (a) ketentuan kriteria bank devisa; (b) merger; (c) pembukaan kantor cabang di pasar internasional; (d) pembiayaan ekuiti, harus dipelajari lagi. Ada yang harus mengalami perubahan, ada pula yang dilonggarkan, ada yang dipertahankan. Secara singkat kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mungkin akan mengarah ke perbaikan demi keberhasilan pelaksanaan strategi ekspor produk-produk non-migas. Mungkin perbedaan antara investment bank, commercial bank misalnya akan dihilangkan (aspek

ini sulit dipecahkan dan akan memakan waktu lama). Atau mungkin juga usaha-usaha meng-go-public-kan bank-bank akan dipertimbangkan? Apakah dalam usaha menciptakan global banking, syarat-syarat untuk menjadi bank devisa diperketat dengan kualifikasi teknis atau diperingan syarat-syarat yang dianggap kurang pragmatis? Apakah pintu masuk ke sektor perbankan akan tetap tertutup bagi kelompok-kelompok usaha besar, dan mereka harus mengeluarkan dana, katakan, sebesar Rp 23 juta, untuk membeli sebuah bank? Bila jalan masuk ke sektor itu telah tertutup, bukankah ini berarti mereka yang sudah berada di dalamnya akan memperoleh semacam kedudukan monopolistik? Lihat saja harga merger yang mendekati Rp 3,5 milyar untuk sebuah bank dengan satu kantor cabang! Mereka yang sudah berada di 'dalam' mungkin tidak akan setuju 'membuka pintunya' kembali karena bila pintu itu telah terbuka, maka harga pasar merger bank pun akan turun.

Berbagai argumentasi mengenai pro dan kontra pembukaan pintu ke sektor perbankan telah diajukan. Bank Indonesia tampaknya cenderung untuk tidak memberi izin pembukaan bank-bank baru. Memperkenankan bank-bank internasional membuka cabang mungkin akan lebih sulit. Berbagai prasyarat harus dipertimbangkan untuk digunakan sebagai kriteria bank devisa. Salah satu prasyarat itu yang terpenting ialah penentuan struktur dana karena ini berhubungan dengan kemungkinan pembiayaan ekuiti. Prasyarat lain mungkin berupa tingkat modal, tenaga ahli, bisnis perbankan itu sendiri, dan pelaksanaan strategi ekspor.

## KESIMPULAN

Setelah kita meneliti angka-angka asset dan modal, deposito, pemberian kredit, jaringan nasional dan internasional, keuntungan dan sebagainya, tampak jelas bahwa bank-bank negara masih memegang dominasi. Sementara itu bank-bank swasta (devisa dan non-devisa) masih tertinggal jauh. Dan, melihat struktur perekonomian kita maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bank-bank pemerintah akan tetap memegang posisi dominan sedangkan bank-bank swasta nasional dilihat sebagai pelengkap yang esensial. Antara dua sektor perbankan itu telah terjalin kerjasama dalam suatu wadah PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia (PT SBPI) yang masing-masing 50% sahamnya dipegang oleh sektor perbankan pemerintah dan sektor perbankan swasta.

Di pihak lain, peranan bank-bank asing (melihat angka-angka *Laporan Mingguan Bank Indonesia*) yang bergiat di Jakarta, dapat dikatakan masih rendah, tetapi bila kita melihat kegiatan perwakilannya dan usaha-usaha off-

shore-nya maka dapat dikatakan bahwa dana-dana yang mereka salurkan cukup besar.

Kebijaksanaan moneter yang diberlakukan 1 Juni 1983 dilihat sebagai satu langkah pertama ke arah pematangan perbankan nasional. Penentuan strategi ekspor akan menciptakan suasana dan kekuatan yang mendorong bank-bank nasional ke perkembangan yang lebih canggih. Tetapi perkembangan tersebut tentu saja sangat bergantung kepada kesungguhan, koordinasi, kebijaksanaan yang tepat untuk menyukseskan pelaksanaan strategi ekspor itu. Bila perkembangan itu dilaksanakan dengan tepat maka besar kemungkinan kekuatan itu akan mendorong perbankan nasional ke industri pertumbuhan (growth industry) dalam Pelita IV. Tetapi kita masih dihadapkan kepada berbagai pertanyaan yang jawabannya masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam dan teliti. Diperkirakan akan terjadi perubahan-perubahan, tetapi masalahnya terletak pada kecepatan pelaksanaan perubahan itu. Sektor swasta mungkin mempunyai batasan waktu (time horizon) yang satu dan lainnya berbeda-beda terutama dengan pihak perumus kebijaksanaan.

